

**TINJAUAN YURIDIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PADA SURAT DAKWAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Eka Lakshmi Fitriani,¹ Aria Zurnetti,² Zarfinal³

1. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang
2. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang
3. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang
e-mail : ekalakshmifitriani@yahoo.com

ABSTRAK

Terjadi ambiguitas pandangan antara aparat penegak hukum yang ada terutama dalam proses pembuatan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yang nantinya membuat ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri terkhusus dalam Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi?; (2) Bagaimanakah pembuktian Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi di pemeriksaan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum?; Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data digunakan meliputi data primer, data sekunder, data tersier, Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dianalisis secara kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tinjauan yuridis unsur perbuatan melawan hukum dalam surat dakwaan tindak pidana korupsi yaitu disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta menguraikan unsur demi unsur setiap pasal dan memasukkan unsur perbuatan melawan hukum tetap dengan menjelaskan melawan hukum formil dan materiil sesuai dengan pasal yang dikenakan berkaitan dengan perbuatan si Terdakwa Tindak Pidana Korupsi(2) Mempertahankan pembuktian Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi di pemeriksaan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan berusaha menjabarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak mungkin menjabarkan peraturan apa saja yang telah dilanggar serta mencantumkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Kata kunci : Melawan Hukum, Surat Dakwaan, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum

**JURIDICAL REVIEW OF ELEMENTS OF DEVOTION AGAINST LAW
BY THE PROSECUTION OF GENERAL PROSECUTORS IN LETTERS
CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION**

Eka Lakshmi Fitriani,¹ Aria Zurnetti, Zarfinal³

1. Bung Hatta University Law Study Program at the Postgraduate University of Padang
2. Postgraduate Legal Studies Program, University of Andalas University, Padang
3. The Bung Hatta University Legal Studies Postgraduate Study Program
e-mail: ekalakshmifitriani@yahoo.com

ABSTRACT

There was an ambiguity of views between law enforcement officers that existed, especially in the process of making indictments by public prosecutors, which would later create legal uncertainty in the process of law enforcement itself specifically in Corruption Crime. The problems raised in this study: (1) What is the Juridical Review of the Unlawful Acts of the Prosecutor on the Corruption Crime Letter ?; (2) How to prove the Action Elements Against the Corruption Law before the trial by the Public Prosecutor ?; This study uses a normative juridical approach. Data used includes primary data, secondary data, tertiary data, data collected through document studies, analyzed qualitatively descriptive. The results of the study indicate that: (1) The judicial review of elements of unlawful acts in the indictment of corruption is compiled carefully, clearly and completely and outlines the elements of each article and includes elements of permanent law by explaining against formal and material law. in accordance with the article imposed relating to the actions of the Defendant of Corruption Crime (2) Maintaining the proof of the Act Against the Crime of Corruption before the trial by the Public Prosecutor is by attempting to describe the criminal act as much as possible outlining what rules has been violated and includes state losses caused by the Defendant's actions.

Key words: Law Against, Indictment, Corruption Crime, Prosecutor.